



THE OFFICE OF
BAMBANG BRODJONEGORO

Sustainable Development Goals

03 Mei 2024

Prof. Bambang Brodjonegoro, PhD

 @bambangbrodjonegoro

 <https://bambangbrodjonegoro.com>



Upaya Pencapaian SDGs ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional

Definisi

Pembangunan berkelanjutan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

4 Pilar SDGs



SDGs dalam Perencanaan Pemerintah

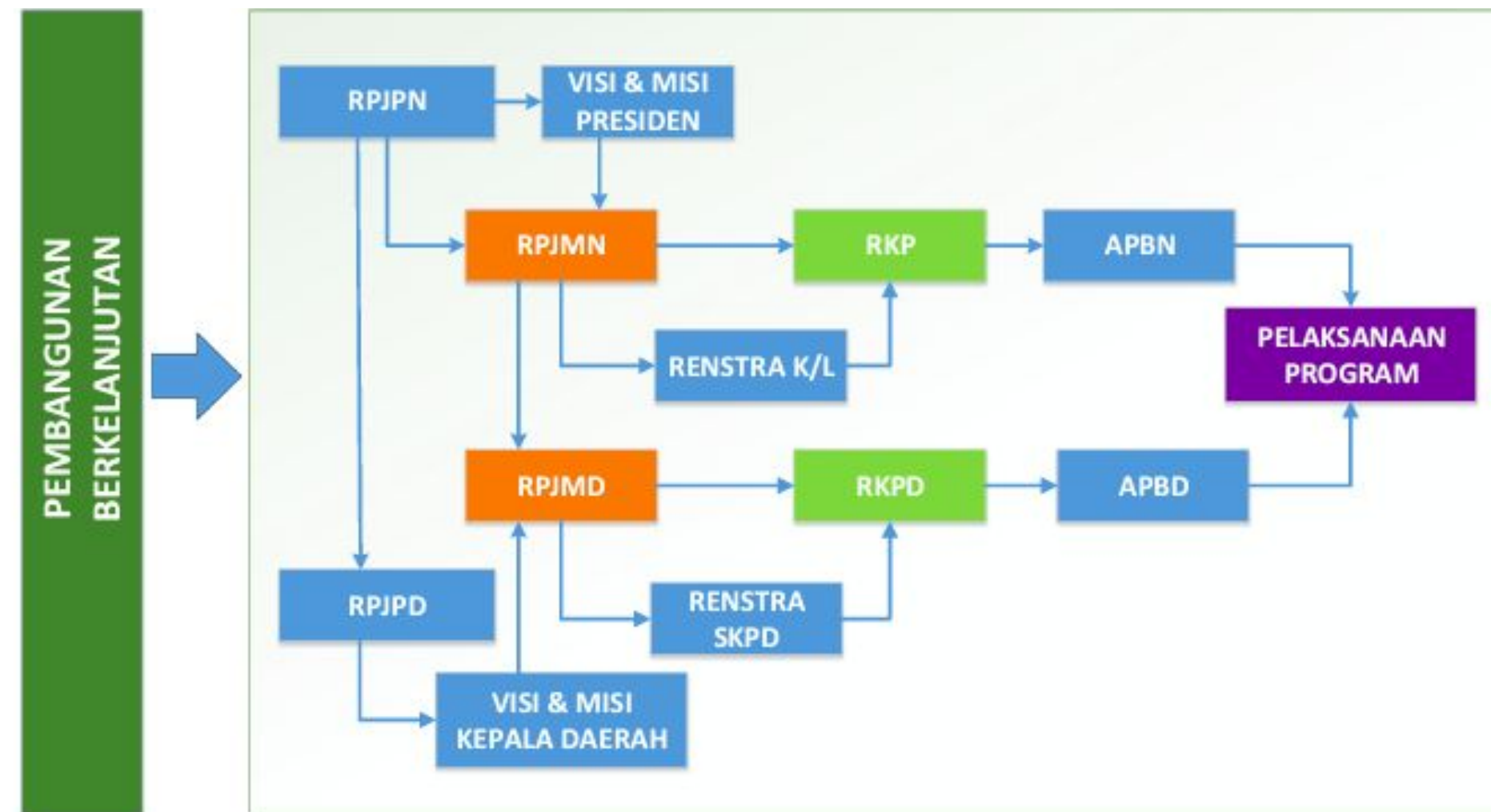
- Target-target SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.
- Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, akan melaksanakan TPB/SDGs bersama dengan Kementerian/Lembaga, Ormas dan Media, Filantropi dan Pelaku Usaha serta Akademisi dan Pakar perlu kembali merumuskan Rencana Aksi (Renaksi) TPB/SDGs sesuai dengan periode RPJMN 2020-2024 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional/RAN) maupun di tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah/RAD).

Pencapaian Indonesia dalam SDGs

- Menurut *Sustainable Development Report 2022*, saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian itu meningkat dibanding tahun 2015 yang skornya masih 65,03%.
- Namun, sampai 2022 Indonesia masih mendapat label 'merah' atau dinilai memiliki tantangan besar dalam penanganan masalah kelaparan, kesehatan, keberlanjutan kota, pelestarian ekosistem laut dan daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, serta kemitraan global.
- Pada 2022 pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5.
- Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan diharapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional tahun 2024 dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih terarah.

Keterkaitan SDGs dengan Kebijakan Pembangunan

SDGs dengan RPJMN 2020 - 2024 dan RPJMD



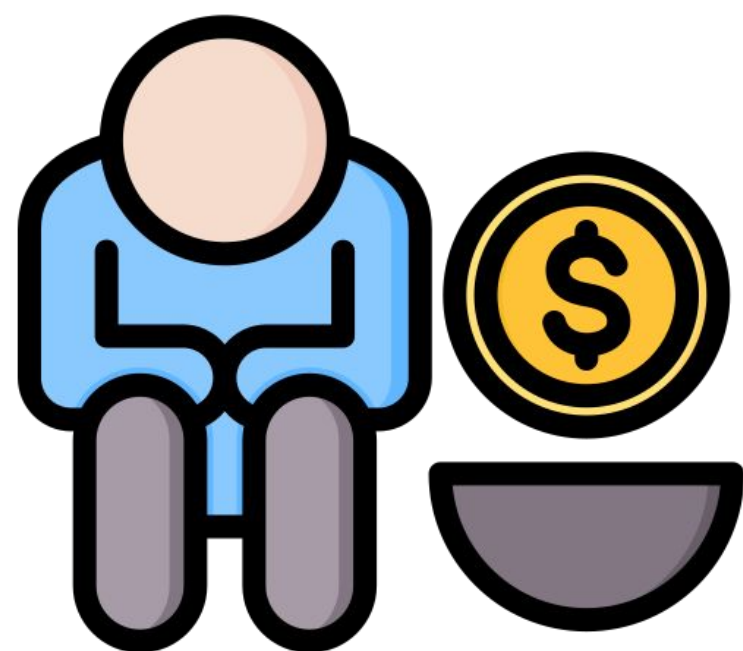
Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

- SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.





Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan



- Tingkat kemiskinan yang sudah rendah membuat kemiskinan semakin sulit untuk diturunkan di mana kelompok termiskin lebih sulit keluar dari jerat kemiskinan karena berada dalam keadaan yang jauh lebih rumit dari sekadar ketidakmampuan finansial seperti: **tempat tinggal yang terpencil, akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, sanitasi layak, juga listrik.**
- Salah satu hal yang menjadi tantangan adalah penurunan tingkat kemiskinan di kawasan termiskin Indonesia. **kawasan timur Indonesia (KTI) selalu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi** dari kawasan barat Indonesia (KBI).
- kebijakan pengentasan kemiskinan perlu memperhatikan stabilitas **makroekonomi** (pengendalian pertumbuhan dan inflasi, khususnya harga bahan pokok). Pada tingkat **mikro**, kebijakan mengenai perlindungan sosial dan ekonomi produktif perlu dilanjutkan.

Arah kebijakan 2025-2030

**Perlindungan Sosial
dan Pelayanan Dasar
yang Berkualitas**

**Penguatan Tata Kelola
dan Kelembagaan
yang Sinergis**

**Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
yang Berkelanjutan**

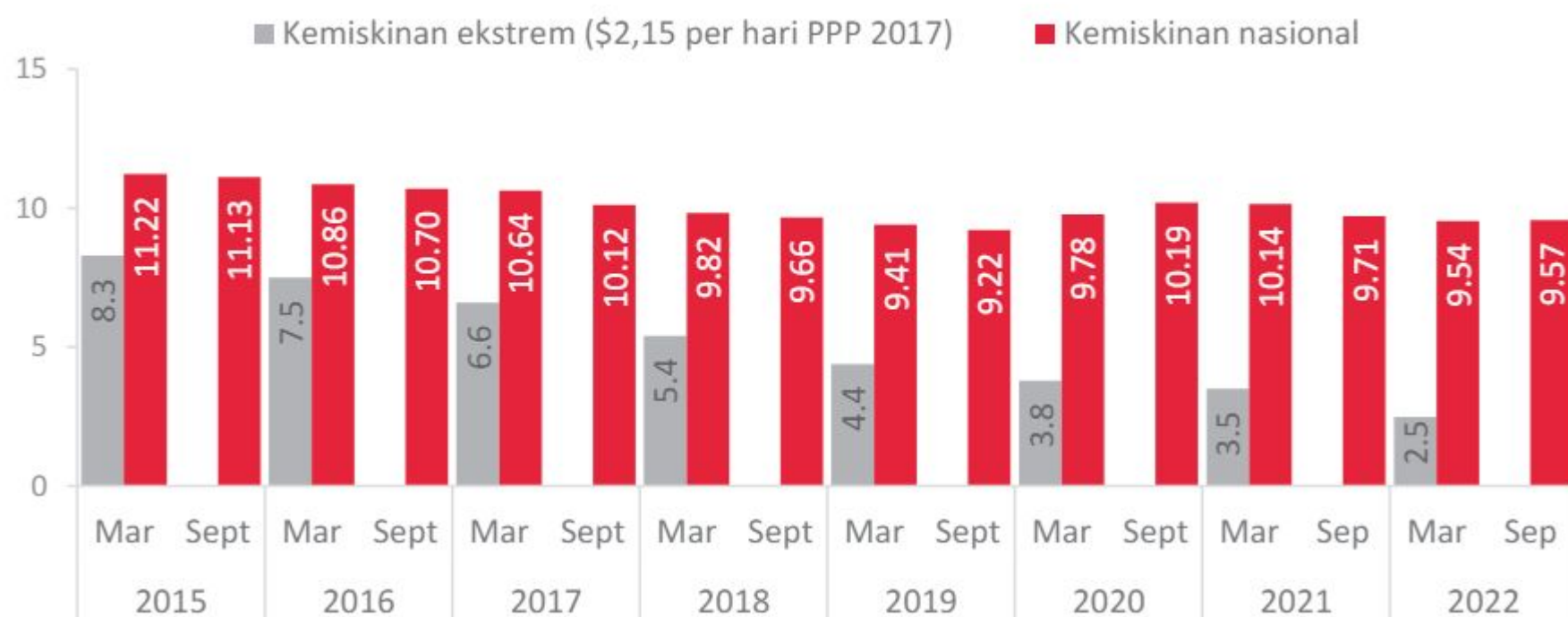


Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

1. Tingkat kemiskinan ekstrem menurun

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran dan integrasi program bantuan sosial masih menjadi tantangan.

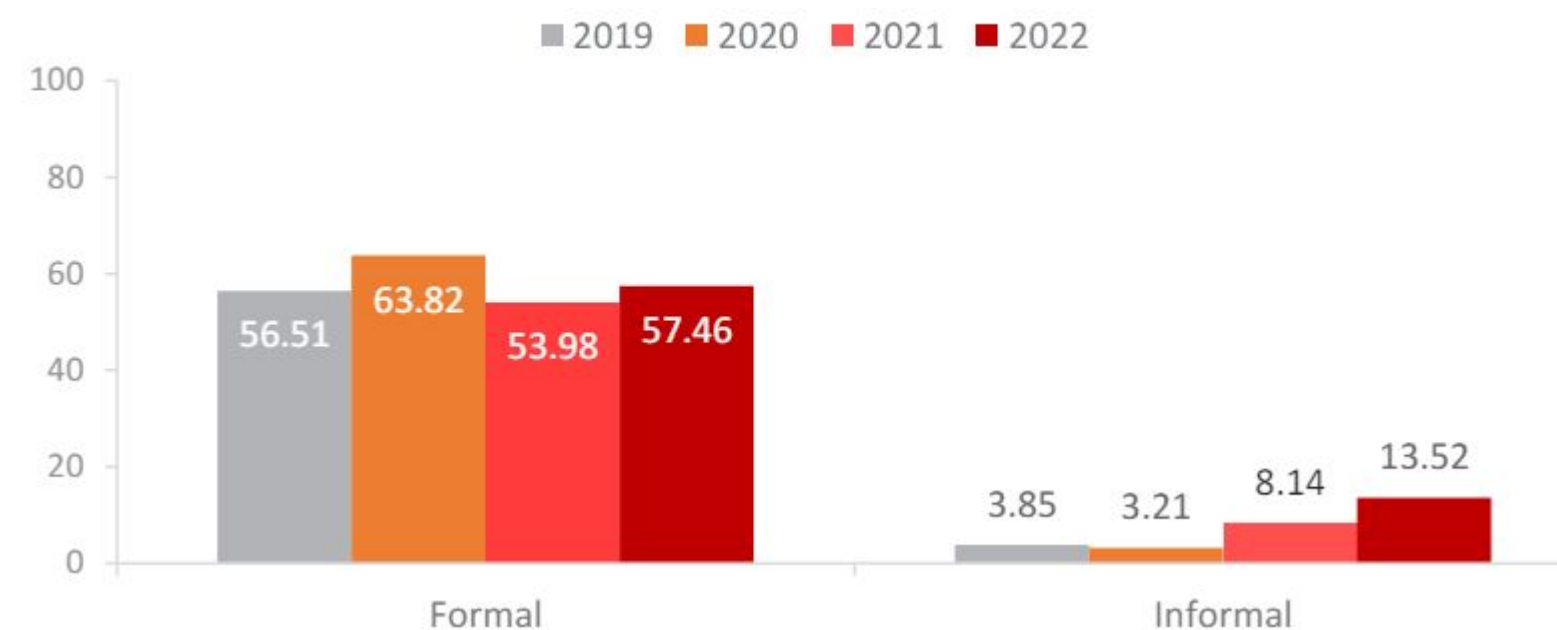
Tren Kemiskinan Ekstrem dan Kemiskinan Nasional, 2015-2022



2. Ketepatan sasaran perlindungan sosial ditingkatkan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran dan integrasi program bantuan sosial masih menjadi tantangan.

Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, 2018-2022



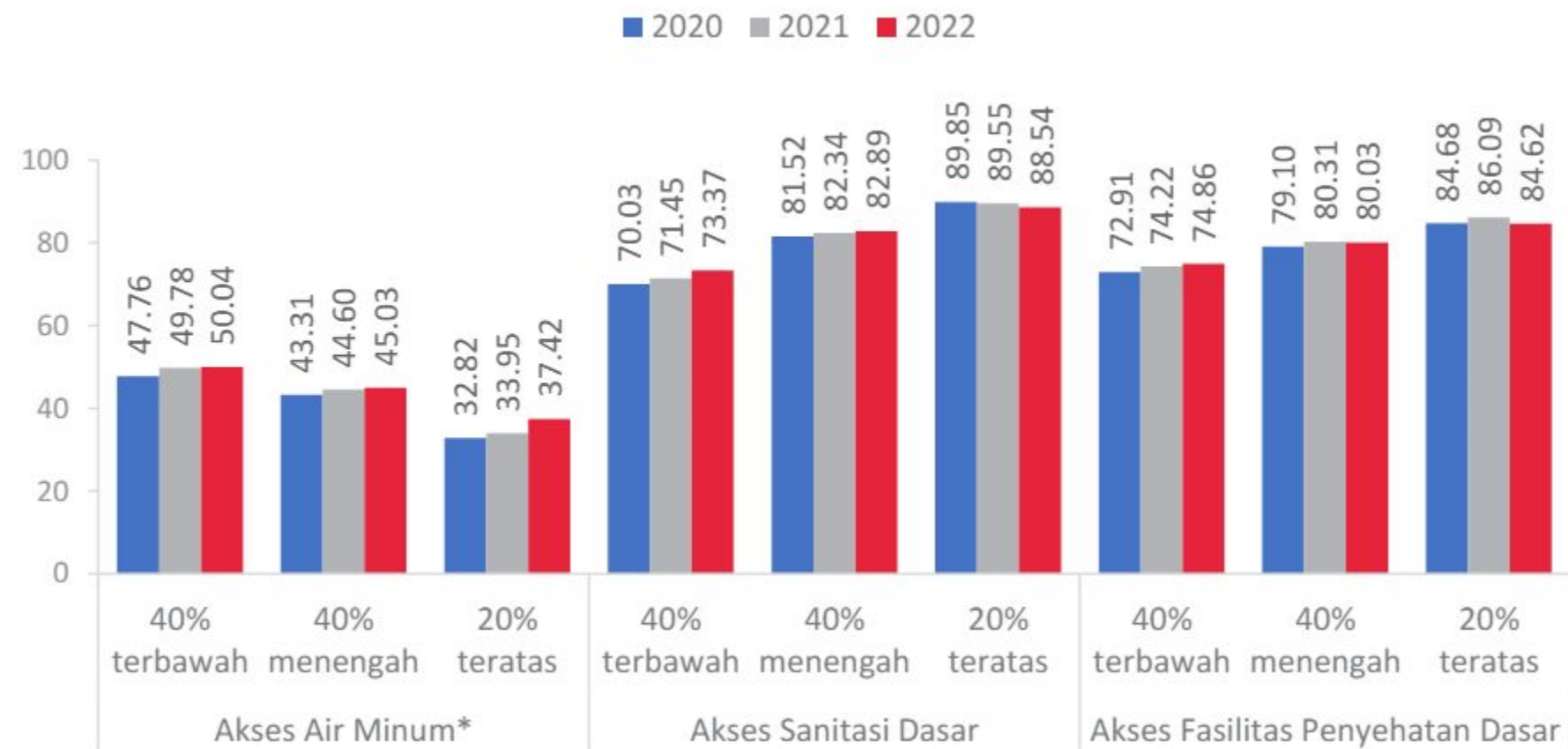


Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

3. Perluasan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

Pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi layak terutama bagi rumah tangga miskin dan rentan ditingkatkan

Akses Terhadap Layanan Dasar Berdasarkan Kuintil Pengeluaran, 2020-2022



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)



Tujuan 2: Tanpa Kelaparan



- **Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Kementerian Pertanian, 2018)** menunjukkan rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik, jalan, dan air yang layak rentan **mengalami kerawanan pangan**.
- **Pada tahun 2013**, 48% balita dari 20 persen rumah tangga termiskin mengalami stunting. Sedangkan pada 20 persen rumah tangga terkaya, persentase balita stunting adalah 29%. Perbedaan ini disebabkan oleh ketimpangan akses terhadap sanitasi dan air minum layak, pelayanan kesehatan, **nutrisi makanan yang tinggi, dan akses yang tidak layak terhadap praktik pengurusan dan pemberian makanan pada balita** antara rumah tangga dengan status sosio-ekonomi dan letak geografis yang berbeda.
- Salah satu tantangan utama dalam pengentasan gizi buruk di Indonesia adalah **tingginya harga makanan bergizi**. Hampir 40% rumah tangga di Indonesia **tidak mampu menerapkan pola makan sehat** dengan harga terjangkau.

Arah kebijakan 2025-2030

Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, terjangkau, sehat, bergizi, beragam, dan aman

Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas SDM pertanian



Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

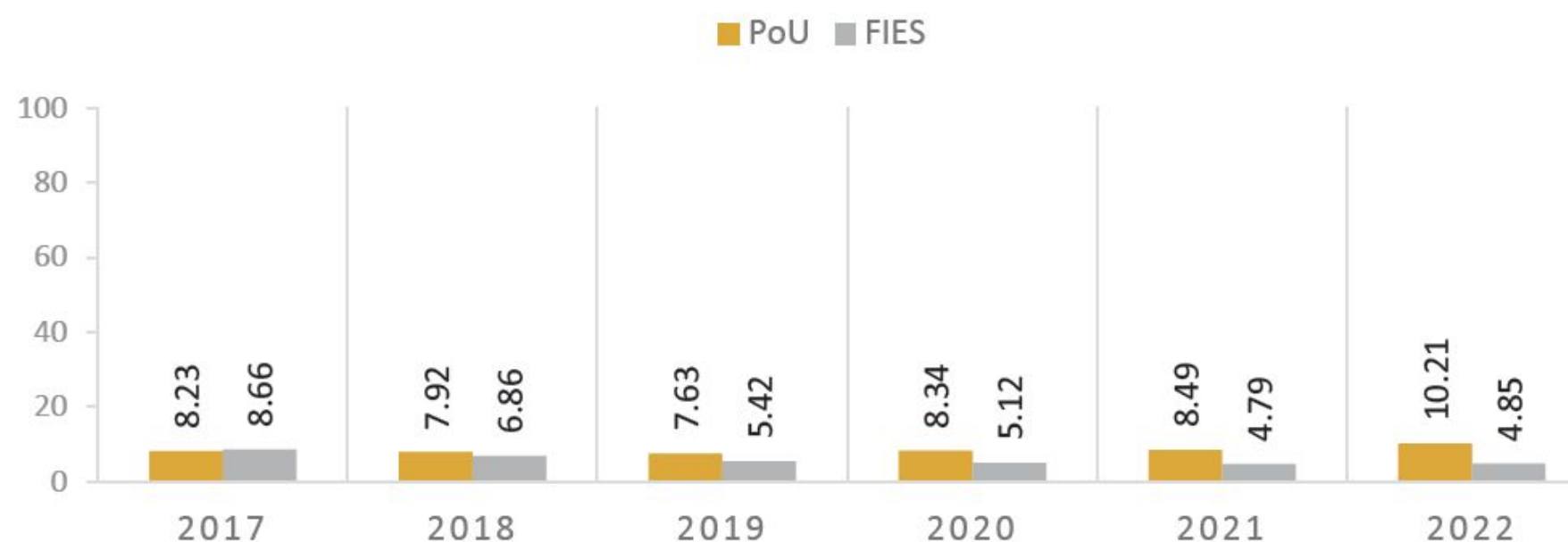
1. Antisipasi krisis pangan global dan peningkatan ketahanan pangan Indonesia

Pasca Pandemi Covid 19, penduduk dengan kerawanan pangan sedang dan berat serta ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat.

2. Percepatan penurunan *Stunting* dan *Wasting* Balita

Prevalensi stunting mengalami penurunan namun menurun secara konstan dalam 10 tahun terakhir.

Tren Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) dan Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Berdasarkan FIES) (%), 2017-2022



Prevalensi Stunting dan Wasting Balita (%), 2013, 2018, 2019, 2021, 2022



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)

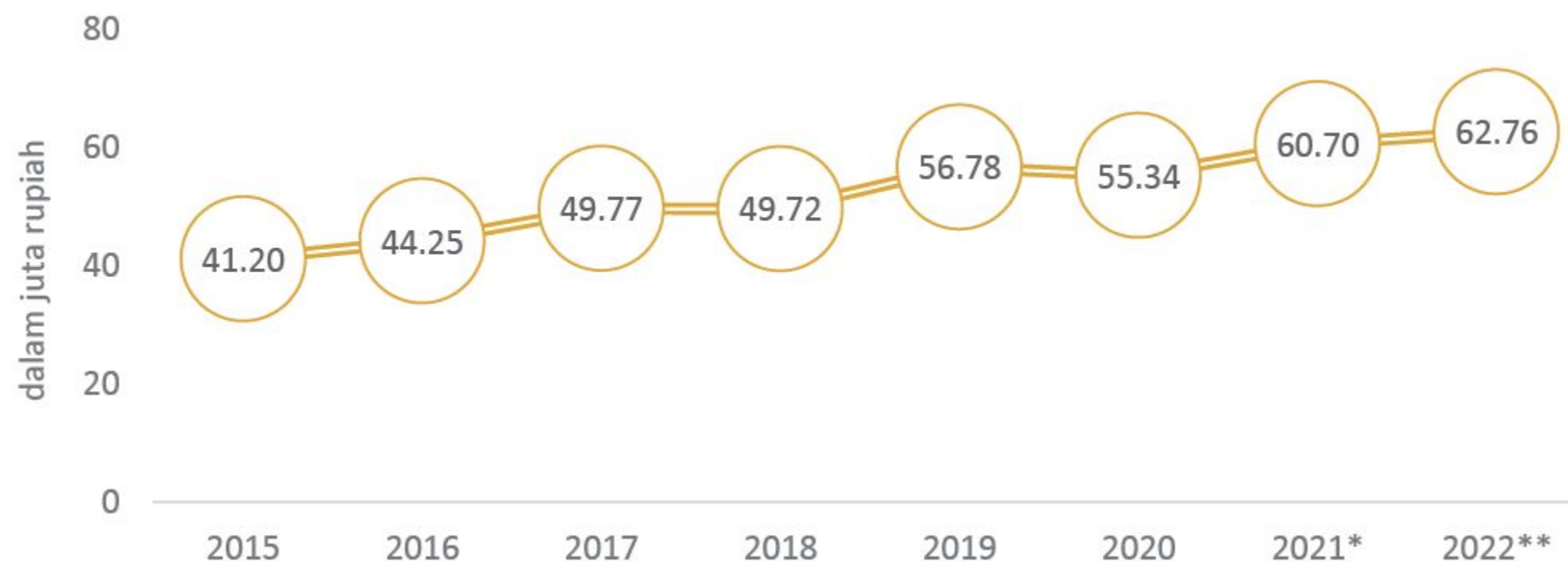


Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

3. Stabilisasi Harga Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Kerja Pertanian

Pada masa pandemi Covid-19, sektor pertanian mampu tumbuh positif dan merupakan sektor yang menjadi bantalan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

**Nilai Tambah Sektor Pertanian per Tenaga Kerja Pertanian
(Menurut Harga Berlaku), 2015-2022**



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)



Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera



- **Angka kematian ibu masih tinggi.** Penyebab utama tingginya angka kematian ibu beragam dari mulai faktor pelayanan fasilitas kesehatan hingga faktor sosial-ekonomi. Di samping itu, para perempuan yang menikah di usia muda memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kematian saat melahirkan.
- Selain itu, **angka kematian anak** juga perlu diperhatikan. Penyebab kematian anak berhubungan erat dengan fasilitas bersalin. Selain faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan sosio ekonomi.
- Meskipun jumlah kematian bayi sudah turun secara signifikan, **angka kematian bayi di Indonesia masih merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.** AKB di Indonesia 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand. Dan masih 1,3 kali lipat lebih tinggi dari Filipina.
- Selain itu, perlu dilakukan intervensi agar terjadi **penurunan berbagai penyakit seperti HIV, tuberculosis, malaria, obesitas dan penyakit lainnya.**

Arah kebijakan 2025-2030

Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah

Penguatan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

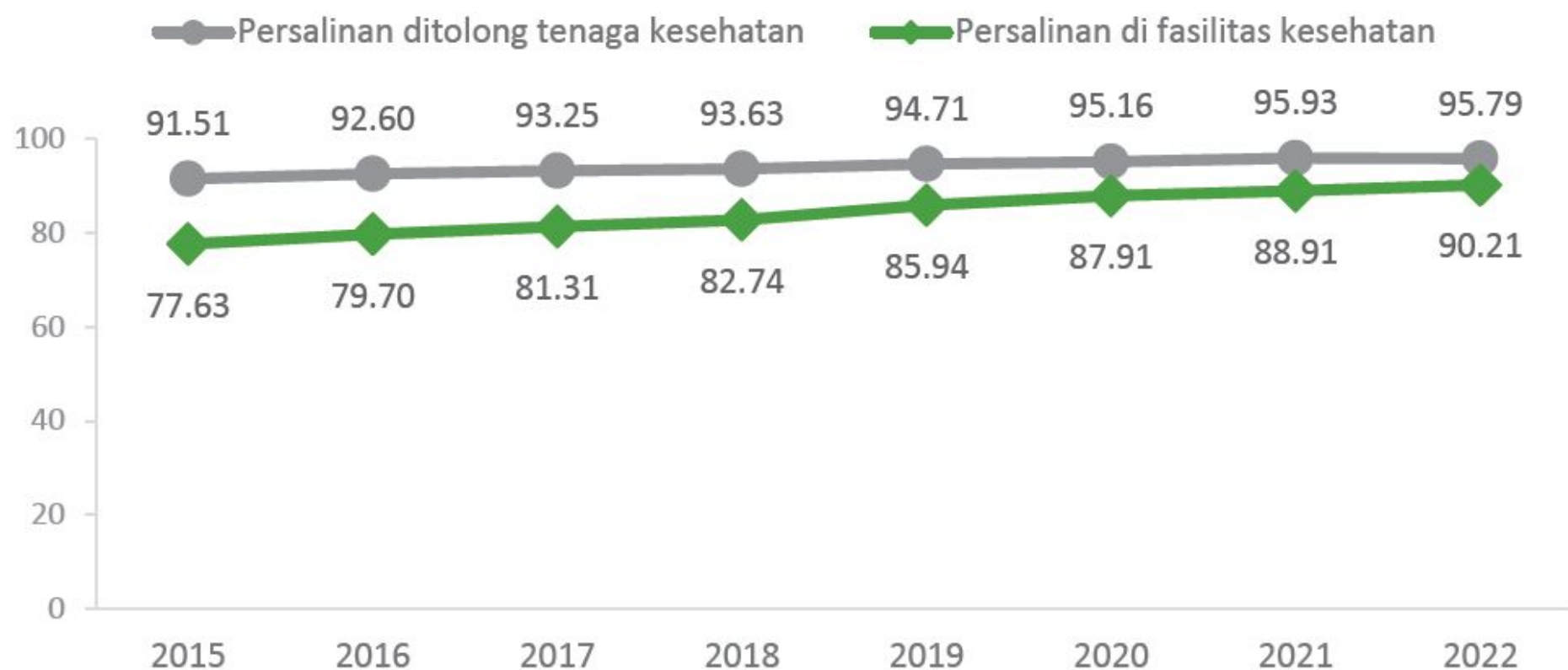


Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

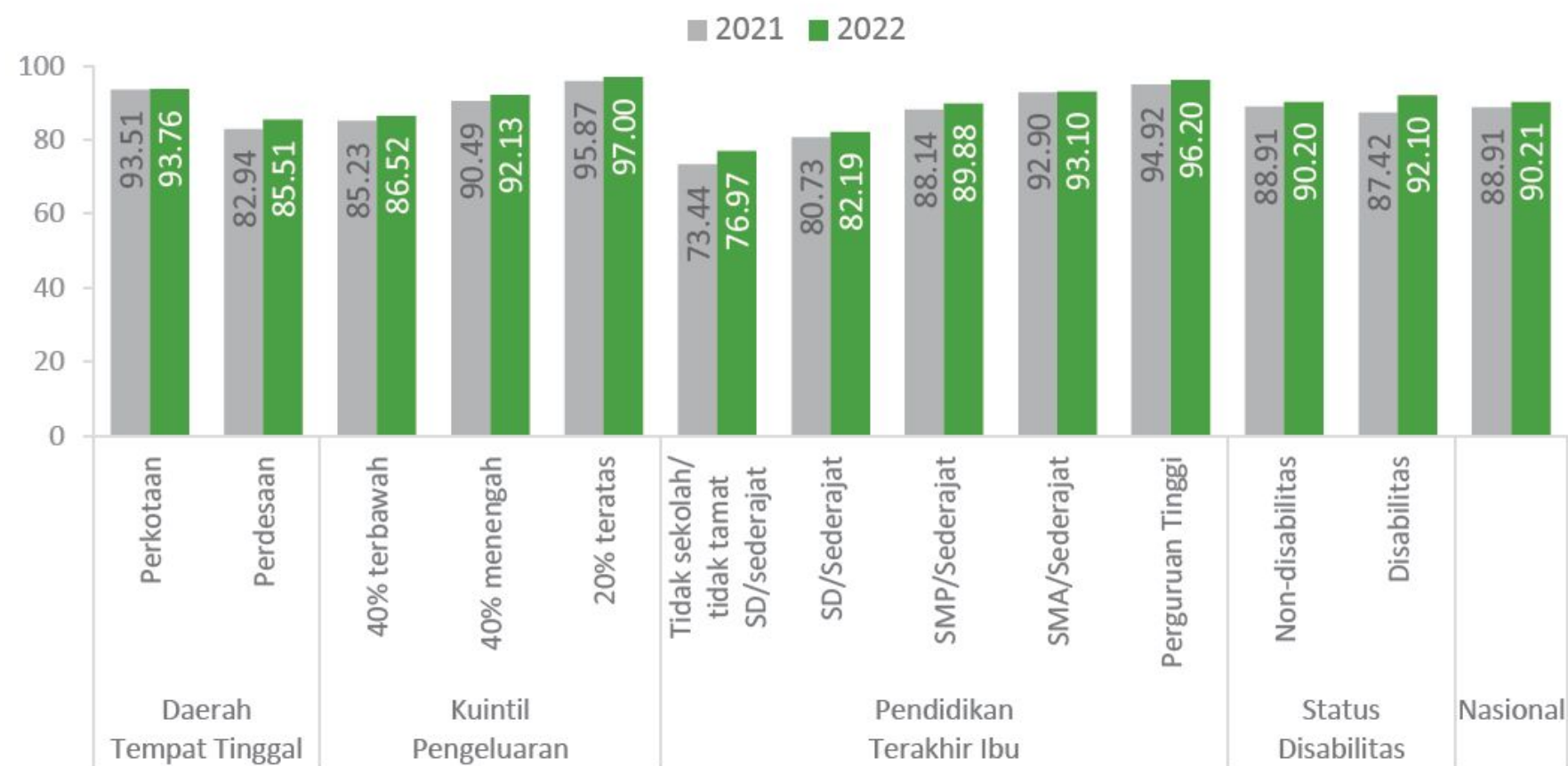
1. Peningkatan Kesehatan Ibu

Salah satu intervensi kunci penurunan kematian ibu adalah persalinan aman ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan

Proporsi Perempuan yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan, 2015-2022



Proporsi Perempuan yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan, 2021-2022



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)

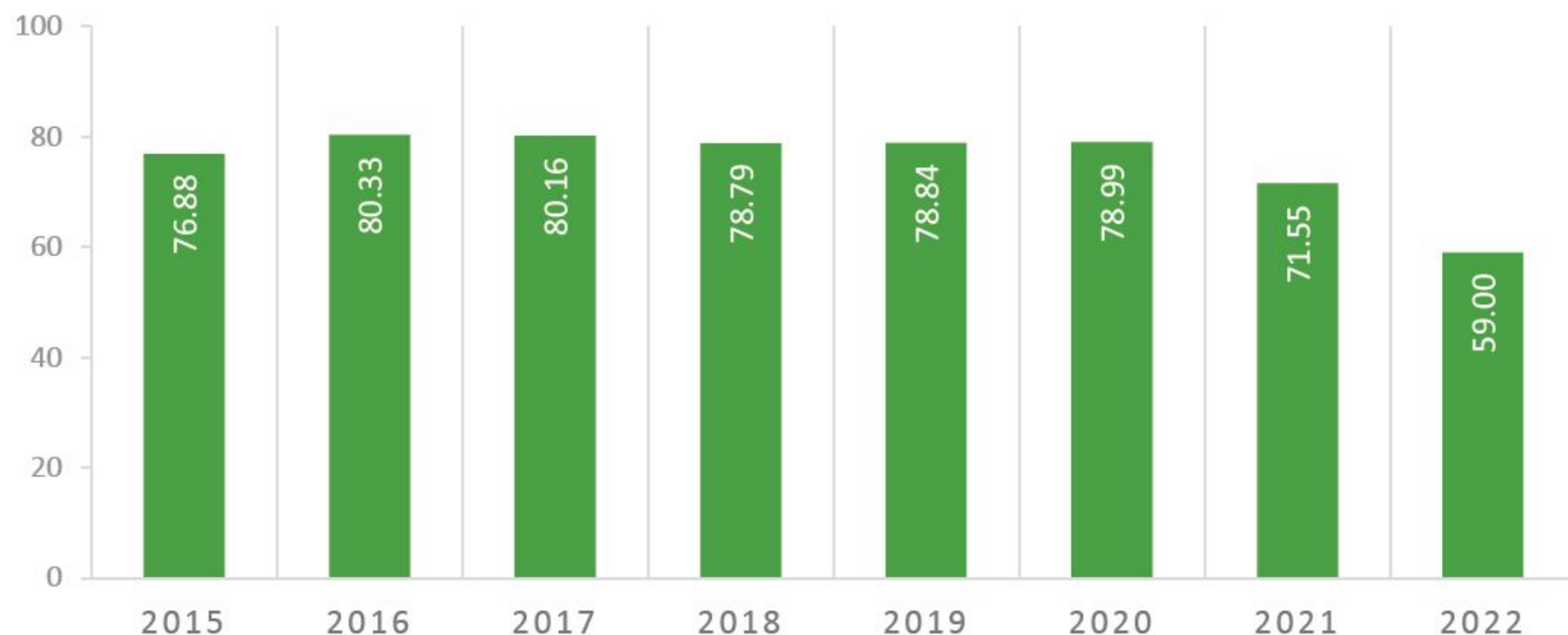


Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

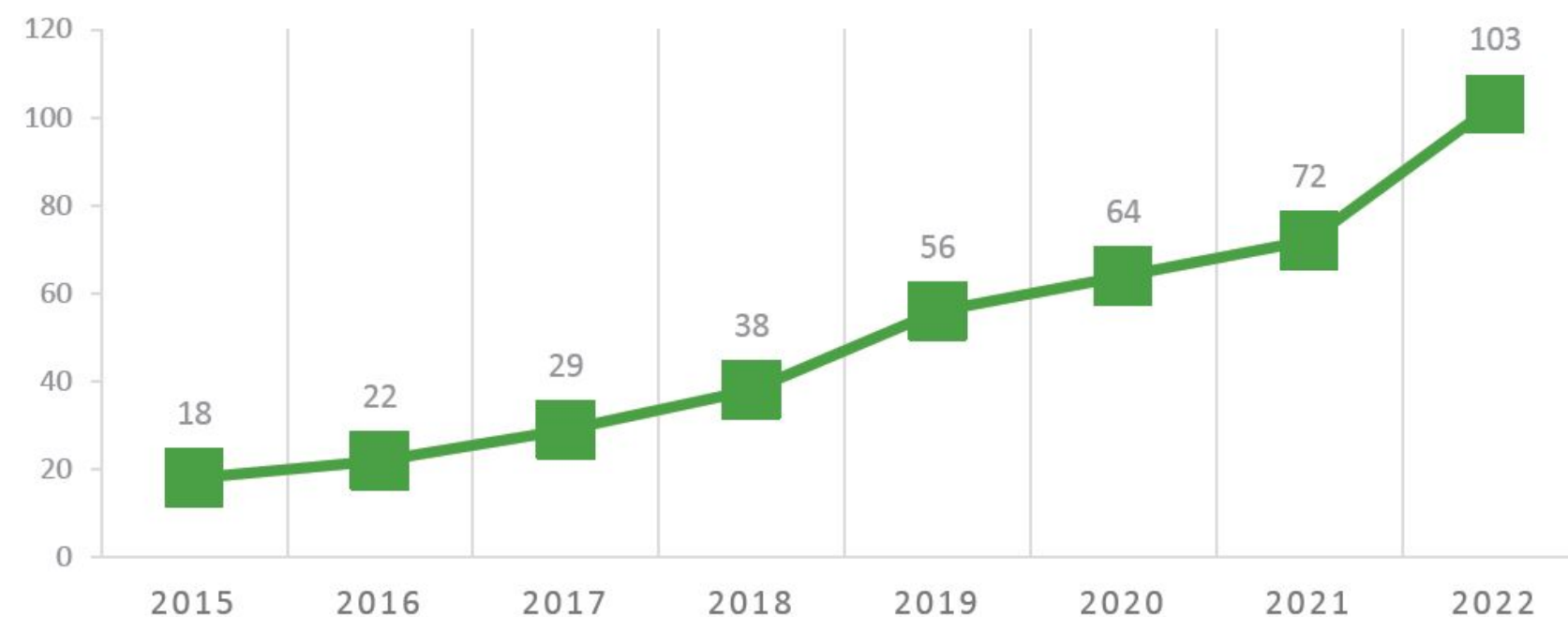
2. Peningkatan Pengendalian Penyakit

Selain malaria, filariasis perlu dikendalikan. Filariasis adalah sejumlah infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria dan dapat menyerang hewan maupun manusia. Ada banyak jenis parasit filaria memiliki ratusan jenis, tapi hanya delapan spesies yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia.

Angka Pencapaian Pengobatan Filariasis, 2015-2022



Jumlah Kabupaten/Kota Endemi Filariasis yang mencapai Eliminasi, 2015-2022



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)

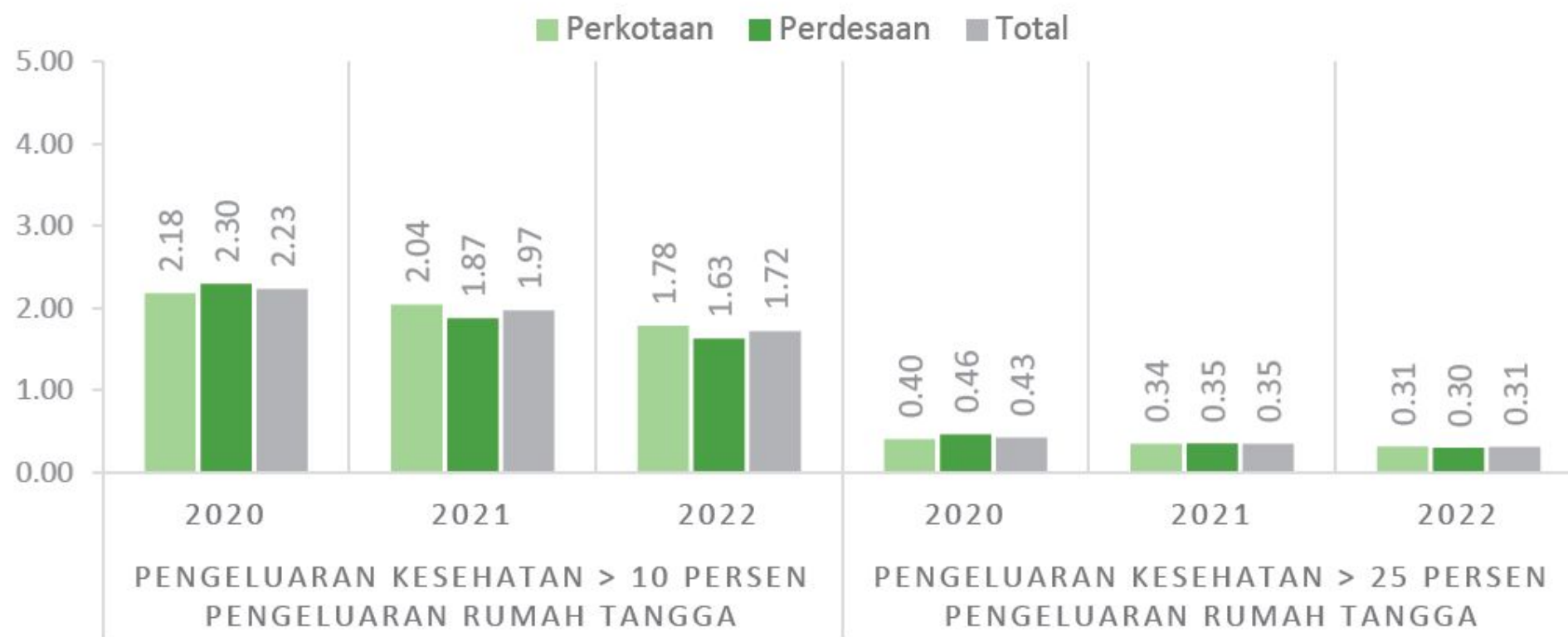


Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

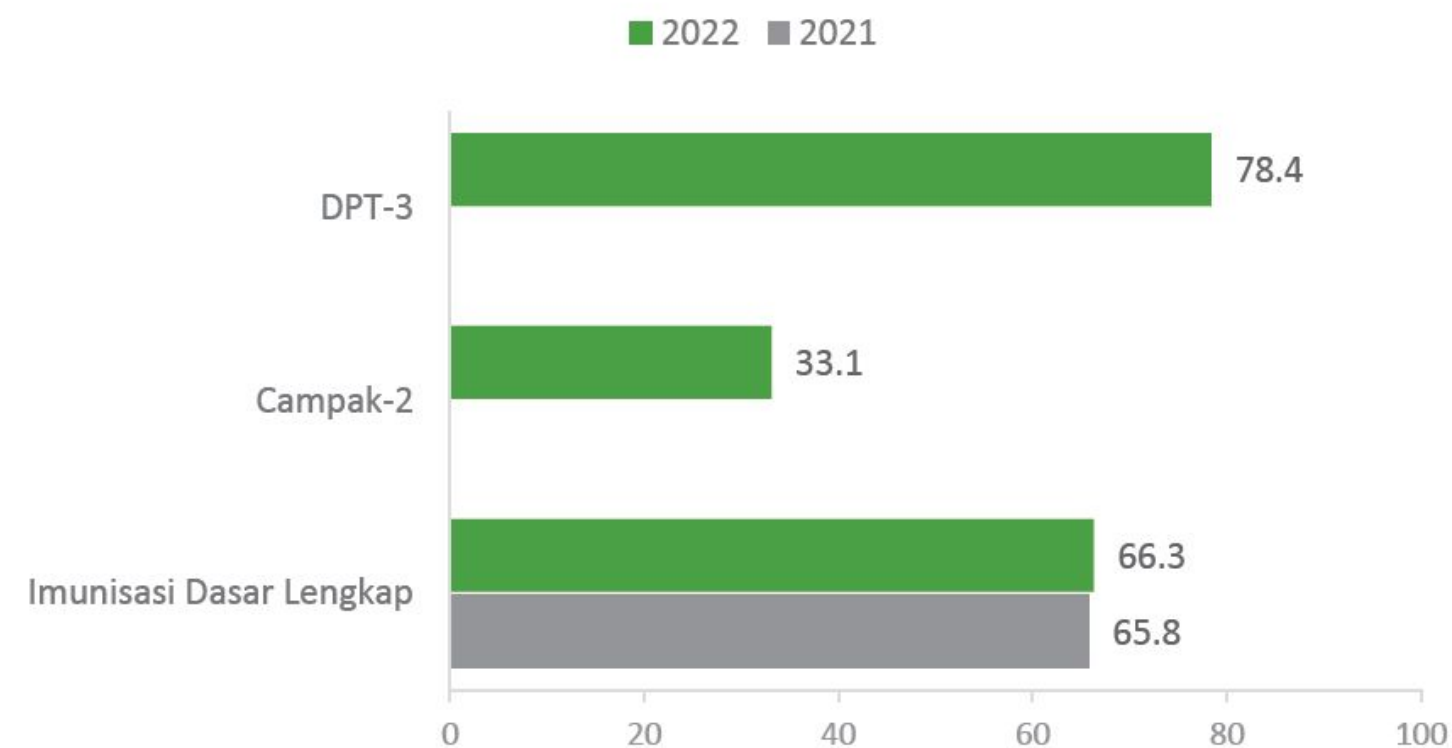
3. Peningkatan Sistem Kesehatan Nasional

Terjadinya penurunan pengeluaran kesehatan menandakan bahwa kepesertaan JKN dapat mencegah terjadinya pengeluaran kesehatan secara berlebihan oleh peserta karena biaya pelayanan kesehatan. Peningkatan cakupan imunisasi bertujuan untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) penyakit di masa depan dan tidak tertanganinya berbagai penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Proporsi Populasi dengan Pengeluaran yang Besar untuk Kesehatan (>10 dan >25% Pengeluaran Rumah Tangga), 2020-2022



Proporsi Anak Usia 12-13 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap, Campak-2, dan DPT-2, 2021-2022



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)



Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas



- Secara rata-rata Indonesia, **skor Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga serta negara OECD lainnya.** Pada tahun 2015, Indonesia menempati posisi ke-62 dari 72 negara partisipan.
- **Angka partisipasi kasar** di tingkat pendidikan dasar di Indonesia **mengalami fluktuasi** yang substansial dari tahun ke tahun, serta cenderung mengalami penurunan mulai tahun 1996 hingga 2018
- Teori pertumbuhan ekonomi modern menjelaskan peran penting kualitas sumber daya manusia pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. **Studi Bank Dunia (2014)** menunjukkan bahwa pada negara-negara berpendapatan menengah ke bawah, pendidikan tinggi meningkatkan pendapatan individu, pertumbuhan ekonomi, produktivitas serta transfer teknologi.

Arah kebijakan 2025-2030

Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran agar siswa memperoleh keterampilan dasar, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai-nilai dan karakter pribadi untuk lebih produktif.

Mempercepat pelaksanaan
Wajib Belajar 12 Tahun

Meningkatkan kualitas
pengelolaan guru dan tenaga
kependidikan

Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja

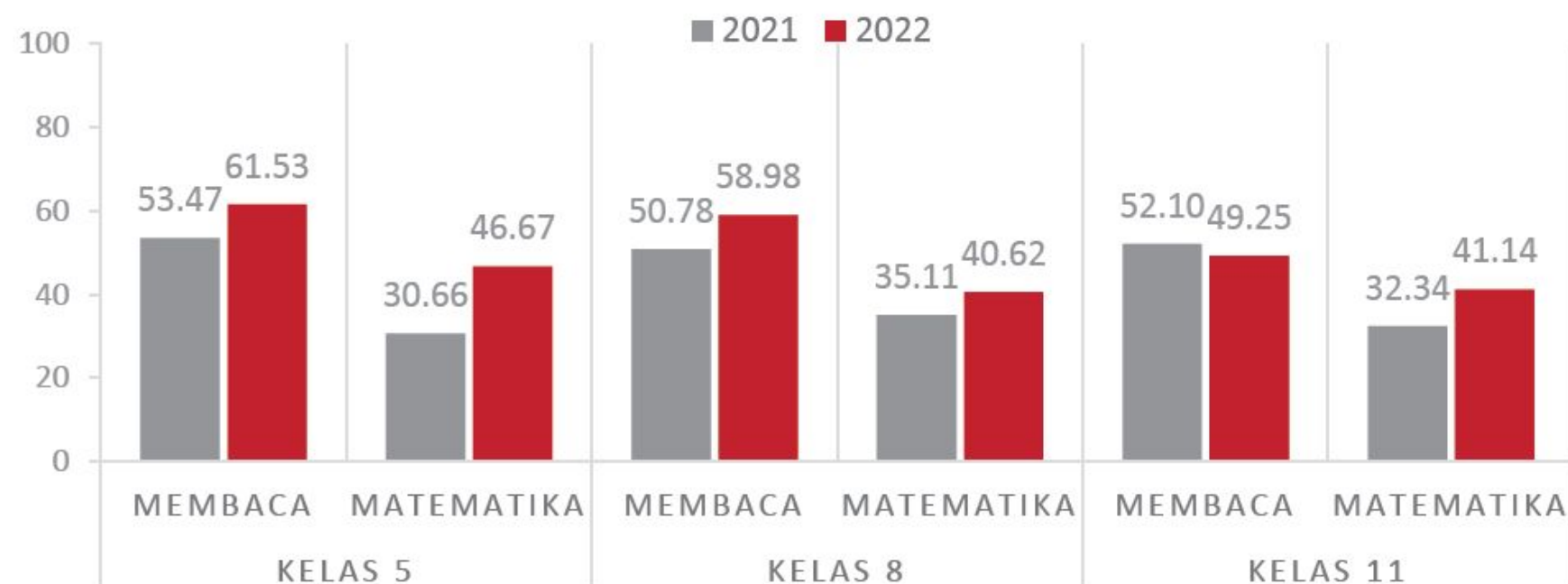


Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

1. Kualitas hasil belajar (*learning outcome*)

Proporsi peserta didik yang mencapai tingkat kemahiran minimum untuk setiap jenjang masih relatif rendah.

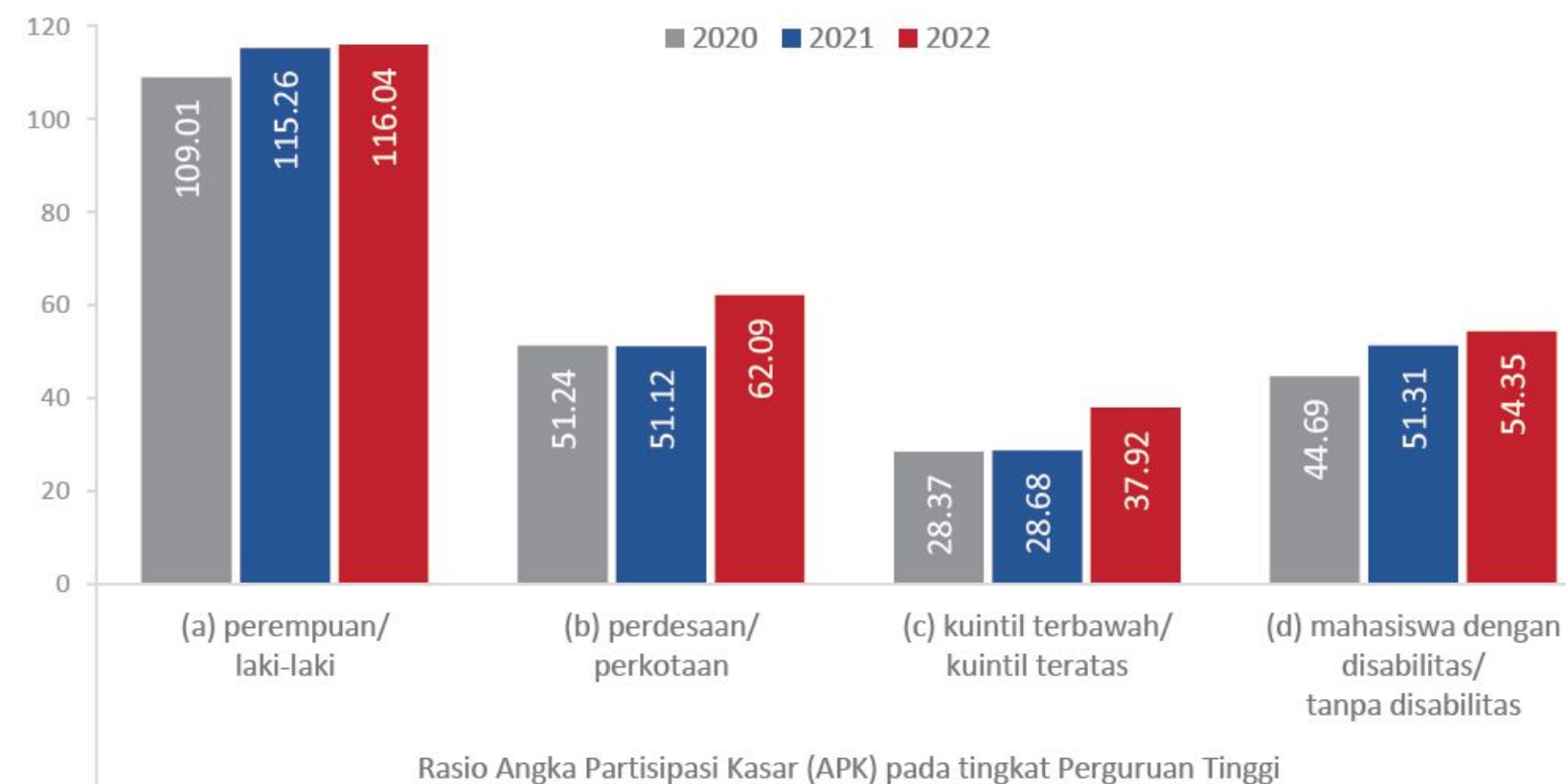
Proporsi Anak-Anak dan Remaja di Kelas 5, Kelas 8, dan Kelas 1 yang mencapai Tingkat Kemahiran Minimum Dalam Membaca dan Matematika, 2021-2022



2. Akses Pendidikan

Pemerataan kesempatan pendidikan menunjukkan hasil nyata

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat Perguruan Tinggi untuk Perempuan/Laki-Laki, Pedesaan/Perkotaan, Kuintil Terbawah/Teratas, dan Disabilitas/Tanpa Disabilitas, 2020-2022

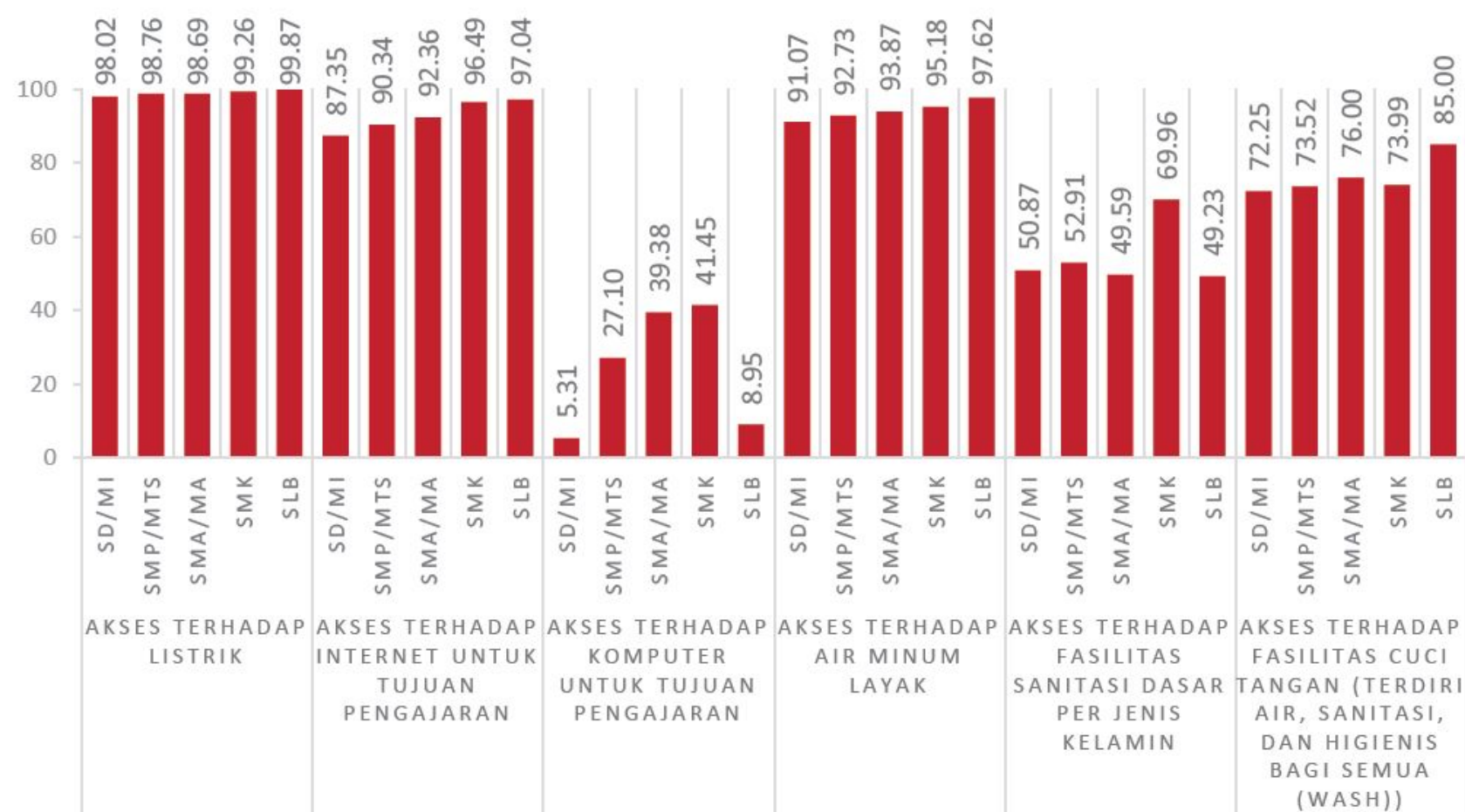




Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

3. Kualitas Sekolah dan Tenaga Pendidik

Proporsi Sekolah dengan Akses ke Listrik, Internet, Komputer, Air Minum, Sanitasi, dan Fasilitas Cuci Tangan (WASH), 2022



- Ketersediaan fasilitas sekolah yang bertujuan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar hampir merata.
- Akan tetapi, akses terhadap komputer untuk tujuan pengajaran dan sarana dan prasarana terhadap sanitasi dasar masih rendah sehingga perlu upaya fokus yang lebih besar untuk memenuhi dua hal tersebut.



Tujuan 5: Kesenjangan Gender



- **Pernikahan anak termasuk ke dalam kekerasan hak asasi manusia, khususnya perempuan.** Pernikahan anak membatasi pendidikan, kesehatan, dan potensi pendapatan dan keamanan dari anak perempuan. Fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena **banyak efek buruk akibat pernikahan anak seperti kerugian secara ekonomi hingga menurunnya kondisi kesehatan** (Otoo-Ooyortey&Pobi, 2003; World Vision, 2013).
- Menurunkan angka KB yang tidak terpenuhi merupakan bagian dari aksi bersama yang disebut “Keluarga Berencana” 2020 untuk **mendukung perempuan dan anak perempuan mendapatkan hak dan kemandiriannya.** Penggunaan metode kontrasepsi telah berkontribusi terhadap **penurunan angka kematian ibu dan praktik aborsi yang tidak aman.** Hal tersebut telah menyelamatkan jutaan hidup perempuan.

Arah kebijakan 2025-2030

Penguatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan merata

Mengakhiri Pernikahan Anak



Tujuan 5: Kesenjangan Gender

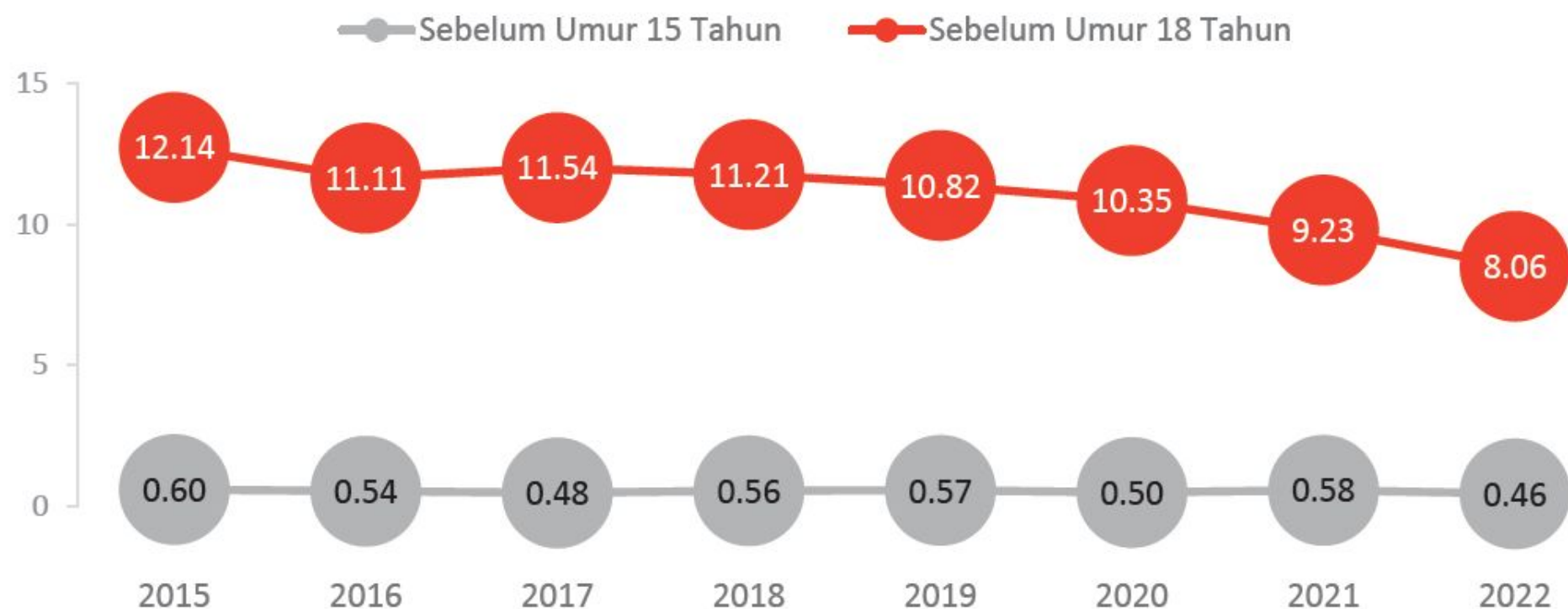
1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan

Meskipun perkawinan anak terus menurun, upaya pencegahan tetap perlu terus dilakukan secara masif untuk melindungi kesejahteraan dan kesehatan anak.

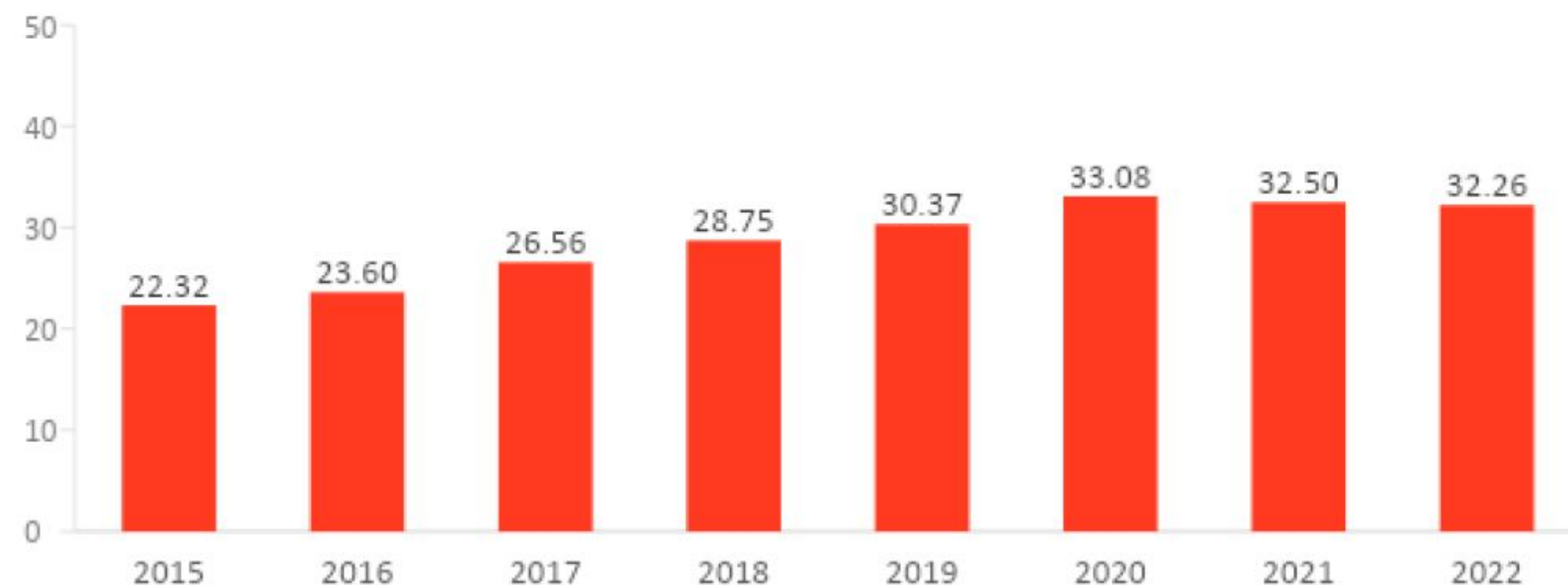
2. Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Rendahnya representasi perempuan dalam posisi manajerial membuktikan masih perlunya upaya untuk menghilangkan paradigma patriarki di masyarakat.

Tren Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Usia Kawin Pertama atau Usia Hidup Bersama Sebelum Umur 15 Tahun dan Sebelum Umur 18 Tahun, 2015-2022



Tren Keterwakilan Perempuan dalam Posisi Manajerial, 2015-2022



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)



Tujuan 5: Kesenjangan Gender

3. Akses Perempuan Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tren Penguasaan/Kepemilikan Telpon Genggam pada Perempuan dan Laki-Laki (Usia > 5 Tahun), 2015-2022



- Persentase perempuan yang menguasai/memiliki telpon genggam masih lebih rendah daripada laki-laki.
- Kesenjangan ini dapat mengakibatkan perempuan semakin tertinggal karena pemanfaatan teknologi berperan penting dalam peningkatan daya saing ekonomi dan penyebaran informasi berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan politik (RPJMN 2020-2024).

Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)



Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak



- **Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional** dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia.
- **BAB sembarangan dan air limbah yang tidak diolah** mengkontaminasi persediaan air dan menjadi sumber penyebaran penyakit diare juga kolera.
- **Satu dari empat anak balita di Indonesia mengalami diare**, yang merupakan penyebab utama kematian balita (UNICEF, 2018).
- Pada tahun 2018, 30,8% anak balita juga mengalami stunting (Riskesdas, 2018). **Intervensi yang kuat, seperti penyediaan air minum, dapat berkontribusi sebesar 70% terhadap pencegahan stunting.**

Arah kebijakan 2025-2030

Peningkatan Akses terhadap Sanitasi Aman



Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

1. Akses Terhadap Air Minum yang Aman

Air minum aman menjadi salah satu indikator penting karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan seperti penyakit bawaan air (*waterborne disease*), stunting, hingga kematian balita.

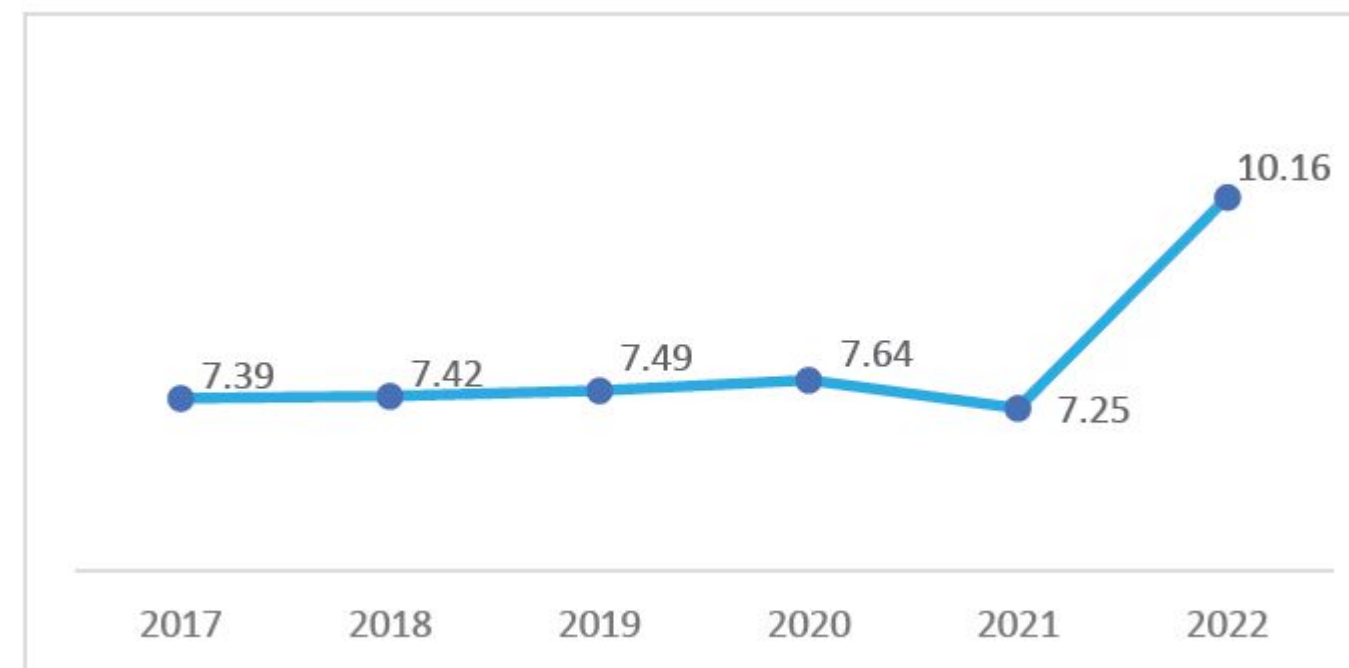
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman Berdasarkan Wilayah, Tahun 2020 (%)



2. Cakupan Sanitasi

Akses terhadap sanitasi aman baru sebesar 10,16% pada tahun 2022.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Sanitasi Aman (%)

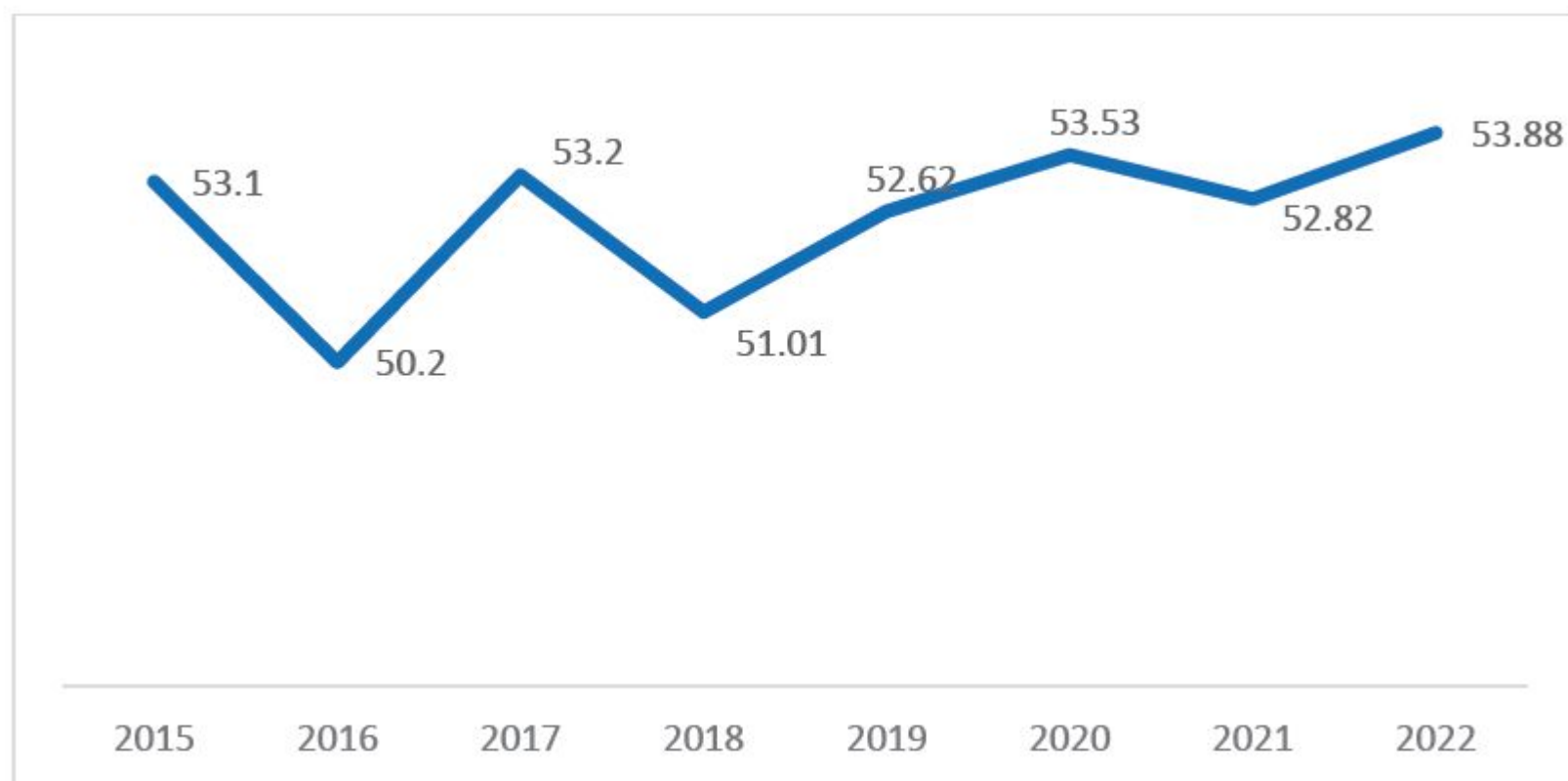




Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

3. Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA)



- Provinsi dengan nilai IKA terendah yaitu Yogyakarta (39,31), DKI Jakarta (41,17), dan Nusa Tenggara Barat (43,39)
- Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas air adalah dengan mengendalikan pencemaran limbah industri.



Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau



- **Konsumsi listrik per kapita** merupakan salah satu indikator pembangunan karena konsumsi listrik menunjukkan aktivitas ekonomi suatu negara.
- **Konsumsi listrik per kapita Indonesia mengalami kenaikan yang stabil dalam beberapa tahun** dan diiringi dengan peningkatan rasio elektrifikasi.
- Peningkatan konsumsi listrik per kapita **harus disertai dengan perbaikan akses terhadap tenaga listrik di masa depan.**
- Mayoritas daerah yang belum teraliri listrik berlokasi di daerah terpencil yang di luar jangkauan PLN. Sedangkan daerah terpencil tersebut **perlu meningkatkan aktivitas ekonominya sehingga permintaan listrik pun terus bertambah.**
- Dari sisi pasokan, **fokus kebijakan harus seputar pemerataan akses terhadap listrik.**

Arah kebijakan 2025-2030

Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan

Memperkuat pemanfaatan aneka energi baru terbarukan

Meningkatkan investasi di sektor energi baru dan terbarukan

Meningkatkan kualitas pasokan listrik

Mengembangkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Mengembangkan teknologi-teknologi baru untuk pengembangan energi baru dan terbarukan



Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

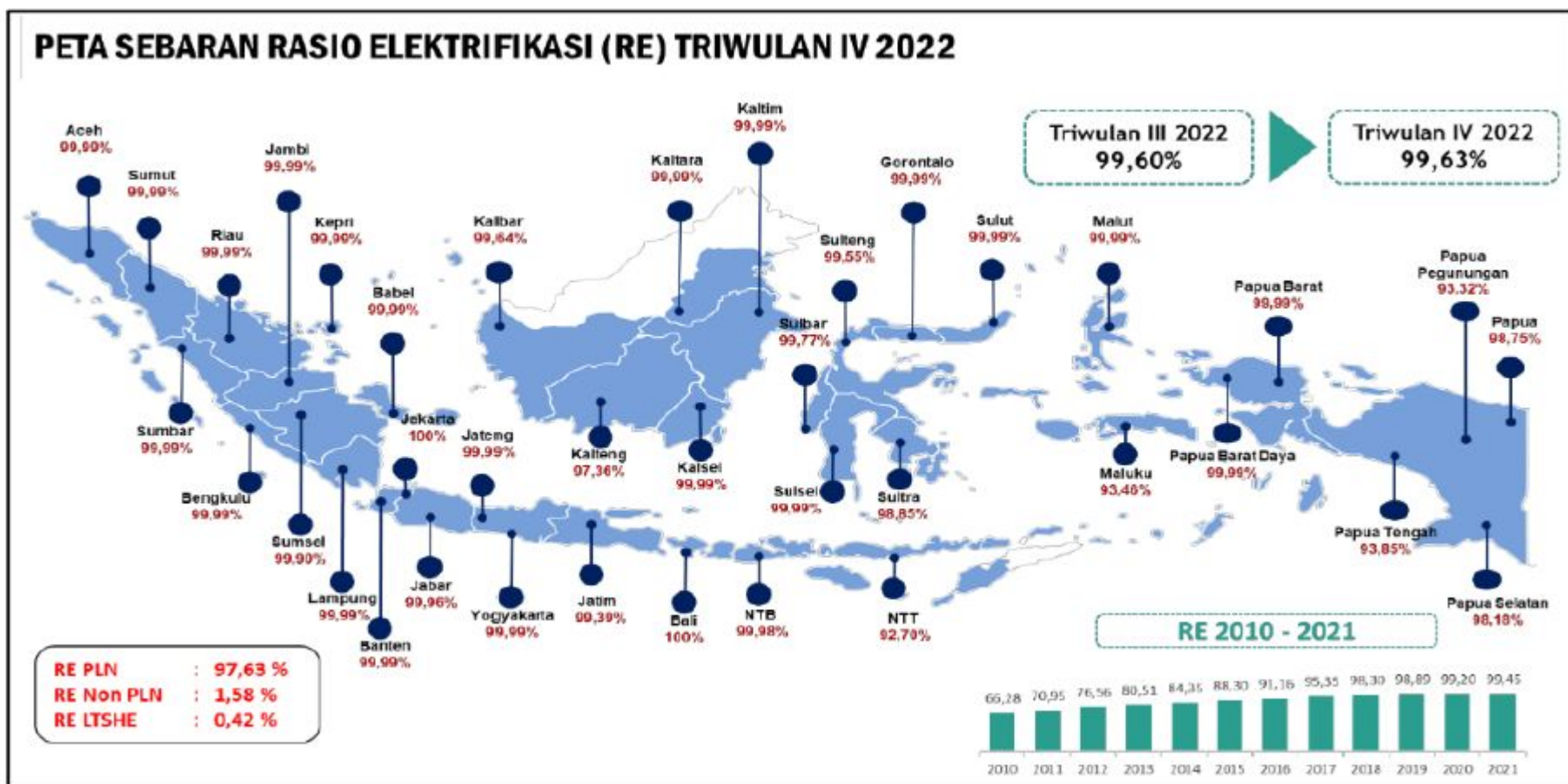
1. Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan

Pada tahun 2022, rasio elektrifikasi (RE) nasional meningkat semula dari 99,45% pada tahun 2021 menjadi 99,63% pada tahun 2022.

2. Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan

Sebagai upaya dalam pengendalian perubahan iklim, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan energi bersih dan berkelanjutan.

Rasio Elektrifikasi



Bauran Energi Terbarukan



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)



Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi



- **Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor manufaktur serta sektor jasa** yang memiliki produktivitas lebih tinggi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan.
- **Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2% diperlukan** agar dapat mencapai angka pertumbuhan PDB rill per kapita hingga 5,4% dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,7%.
- **Pendekatan yang multisektoral** harus dilakukan untuk mempercepat pencapaian target.
- Langkah-langkah utama yang dapat dilakukan untuk mendorong transformasi struktural di Indonesia salah satunya adalah **meningkatkan interkonektivitas melalui pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap komoditas bahan mentah melalui diversifikasi produk.**

Arah kebijakan 2025-2030

Increasing productive workers

Peningkatan Keragaman Wisata

Melanjutkan kebijakan reformasi struktural melalui peningkatan produktifitas ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan

Melanjutkan kebijakan reformasi struktural melalui peningkatan produktivitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

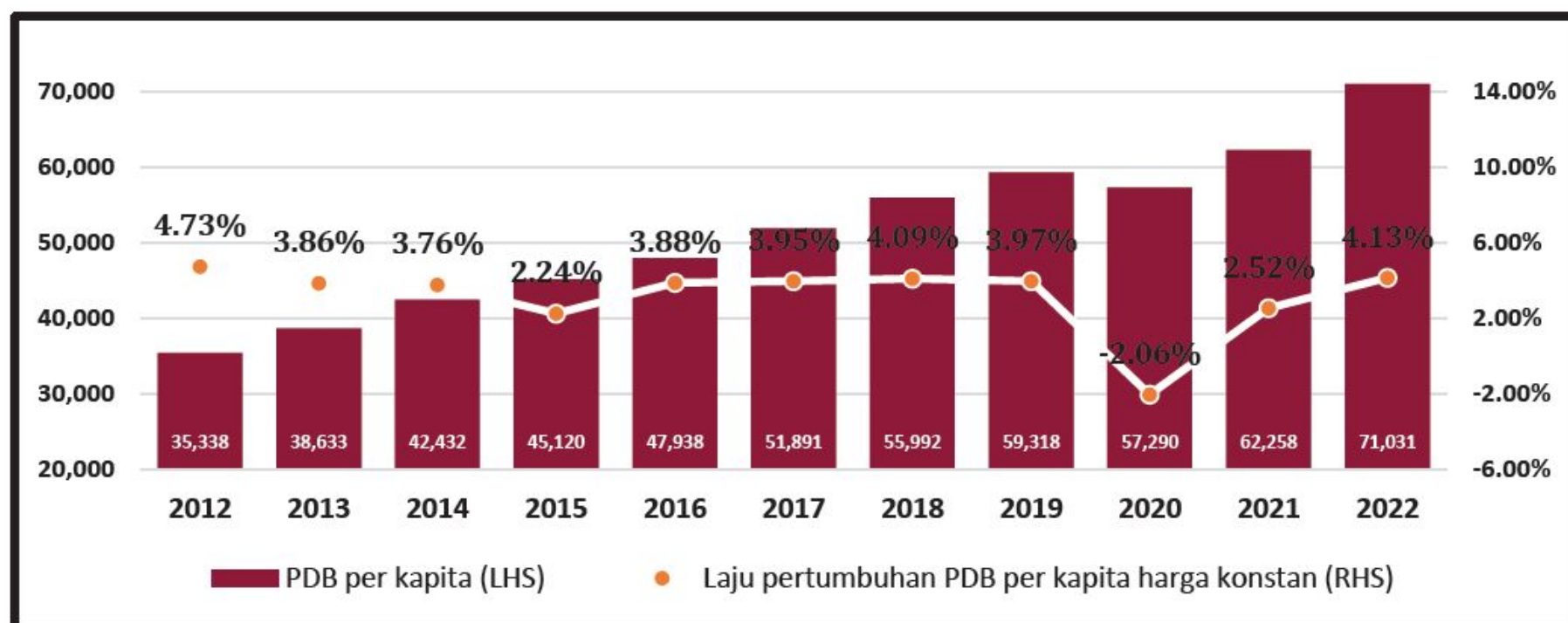


Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020, saat pandemi covid-19 melanda. Indonesia masih belum mencapai pertumbuhan ekonomi 6% sejak tahun 2012.

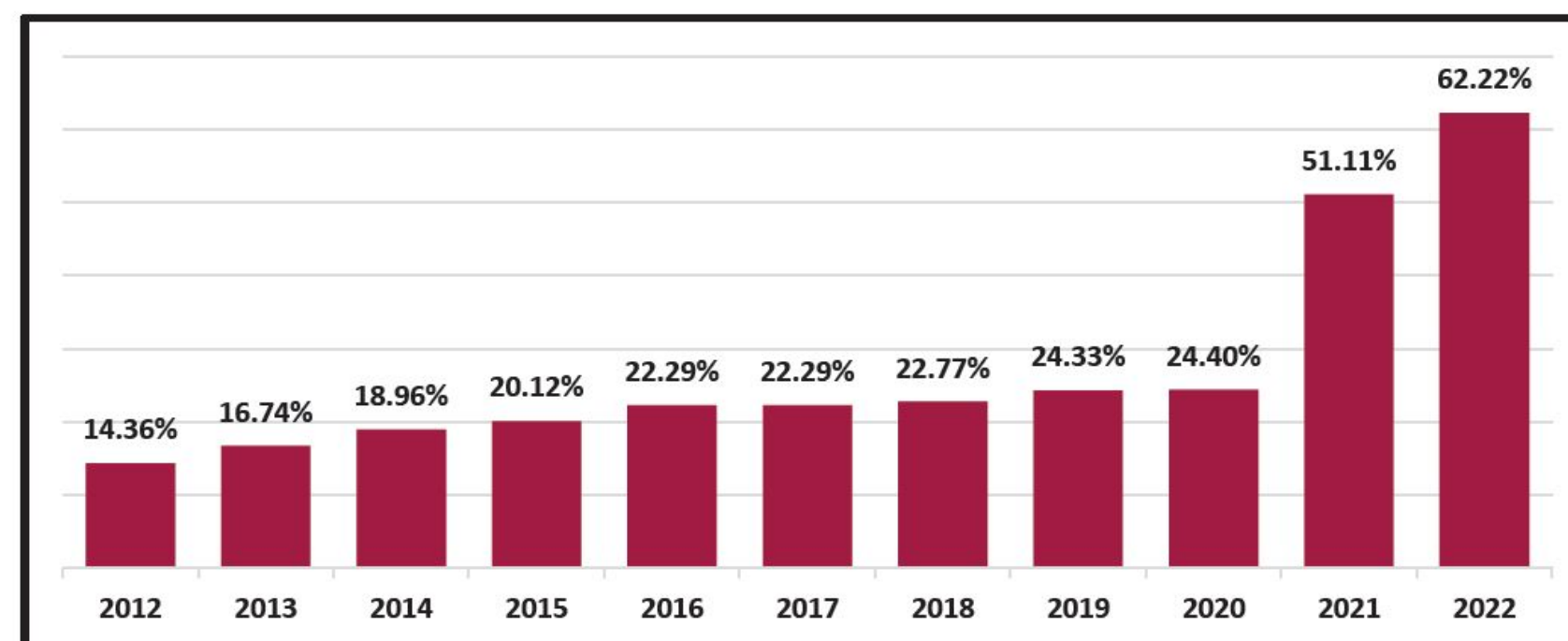
Tingkat Nominal dan Pertumbuhan PDB Per Kapita Harga Konstan
(Dalam Juta Rupiah)



2. Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi UMKM

Pada tahun 2019, UMKM berkontribusi sebesar 60,5% dari total PDB Nasional (Kemenkopukm, 2019).

Persentase Akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)
ke Layanan Keuangan



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)

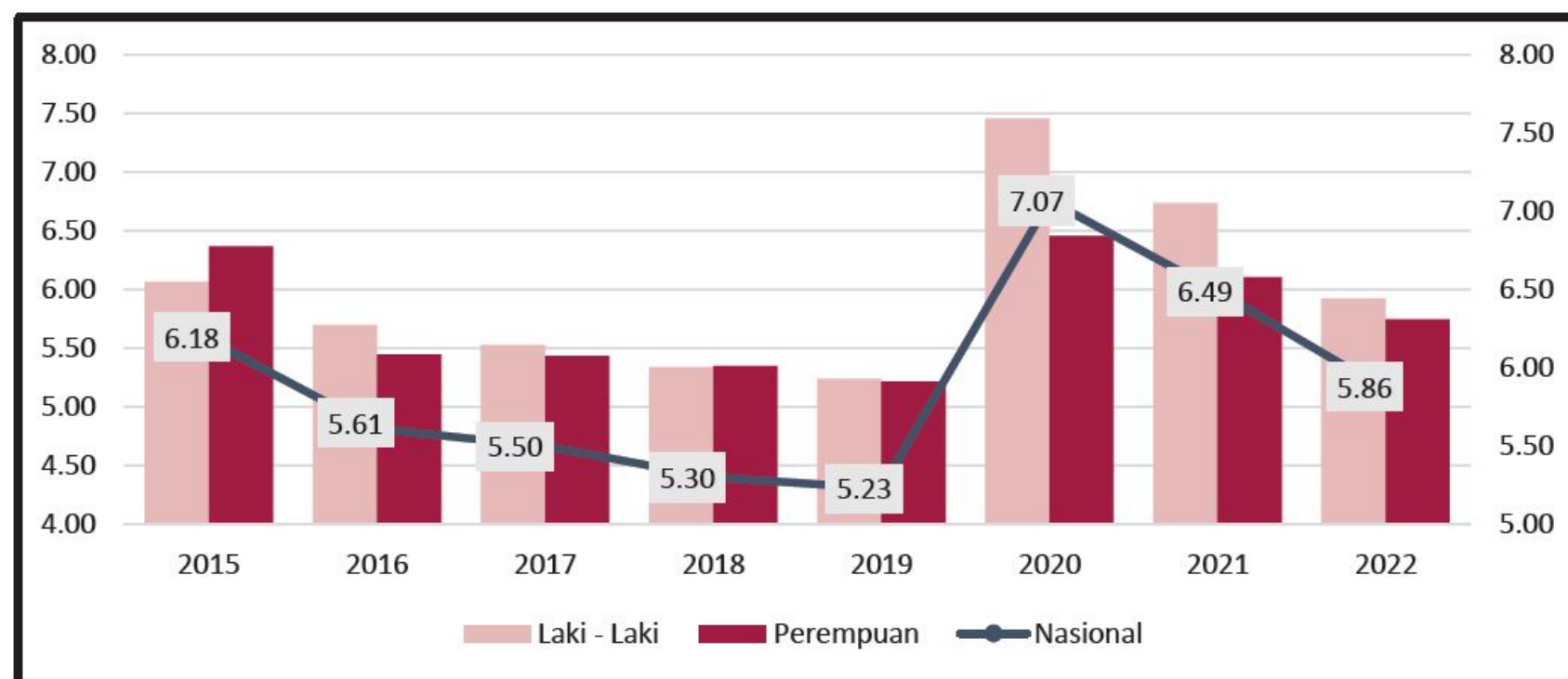


Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

3. Perkembangan Sektor Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia mengalami tanda pemulihan sejak pandemi covid-19 melanda.

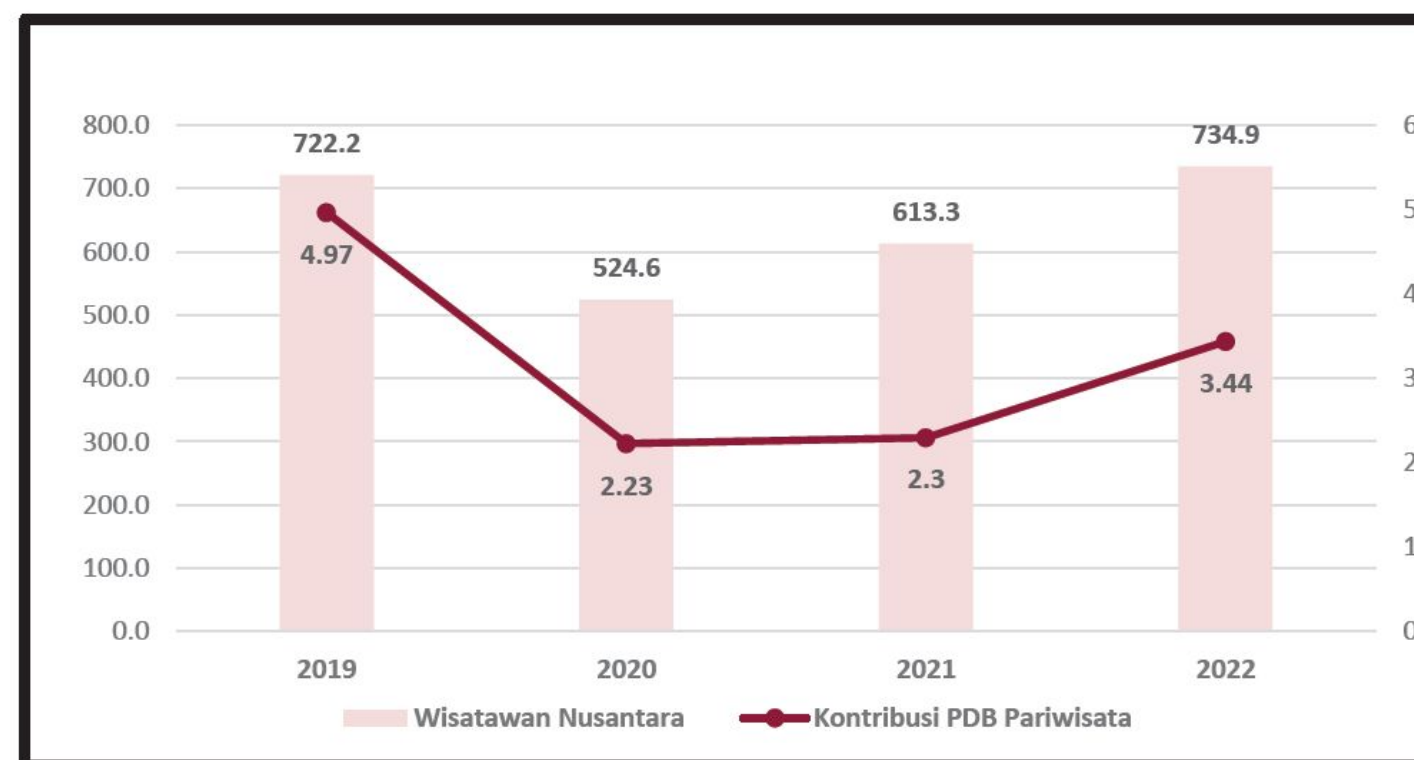
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)



4. Kondisi Nilai Tambah Sektor Pariwisata

Pasca pandemi covid-19, restriksi perjalanan perlahan dilonggarkan.

Capaian Perjalanan Wilayah Nusantara (Juta Orang) dan Kontribusi PDB Pariwisata (Persen)



Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)



Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur



- Proses transformasi struktural mendorong adanya **pergeseran sektor primer seperti pertanian dan pertambangan ke sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi seperti sektor industri dan jasa.**
- Dengan demikian, **ketergantungan perekonomian terhadap sektor primer perlu dikurangi**, dan proporsi PDB yang lebih tinggi perlu berasal dari sektor industri dan jasa.
- **Mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian** meskipun sektor tersebut bukan lagi penyumbang terbesar bagi PDB.
- Di samping itu, **proporsi pegawai yang bekerja pada sektor manufaktur berada dalam kondisi stagnan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,4% per tahun dalam satu dekade terakhir.**
- Angka ini menunjukkan bahwa kualifikasi dan **kompetensi pekerja di Indonesia masih belum sesuai dengan laju transformasi struktural perekonomian.**

Arah kebijakan 2025-2030

Pengembangan industri dengan kompleksitas dan nilai tambah tinggi

Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja Industri Ke Arah Industri Dengan Kompleksitas Dan Nilai Tambah Tinggi

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Litbang yang Lebih Efektif dan Efisien

Pengembangan Ekosistem Inovasi yang Advanced dan Terintegrasi

Pengembangan Sistem Anggaran dan Insentif Litbang

Pengembangan Jangkauan *mobile broadband*

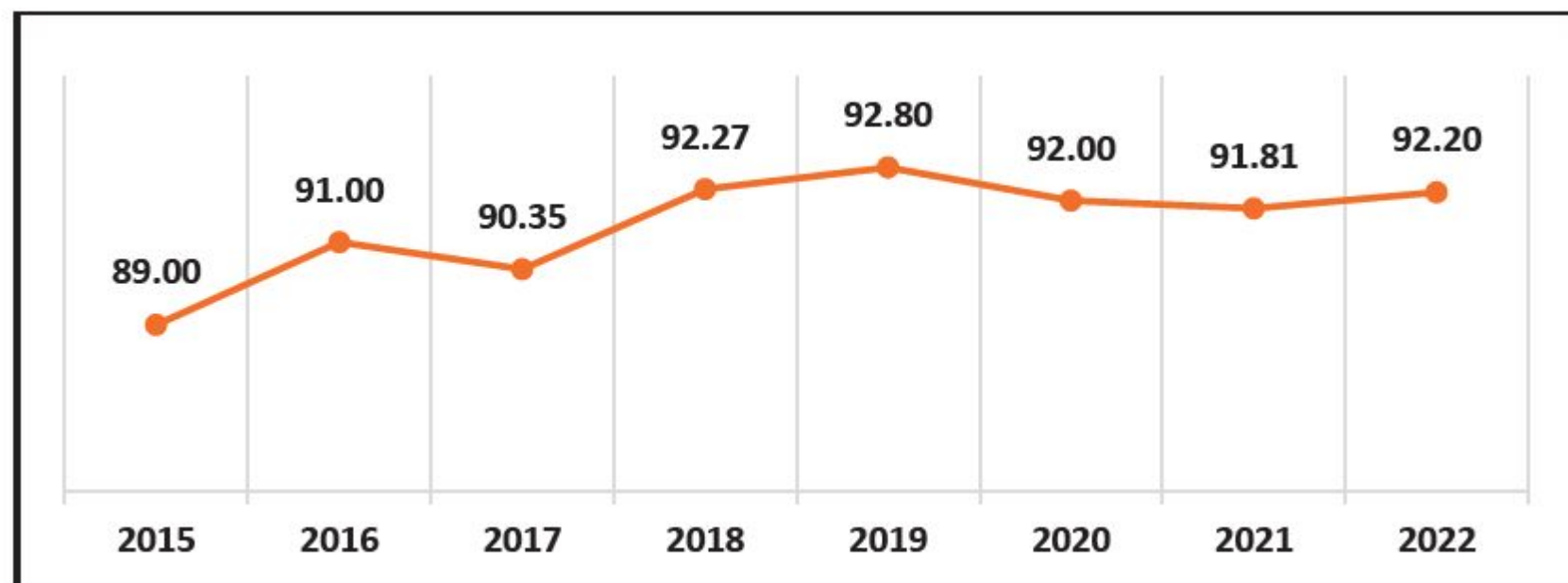


Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

1. Kondisi Infrastruktur Indonesia

Peningkatan kualitas kondisi mantap jalan nasional merupakan upaya akselerasi pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19

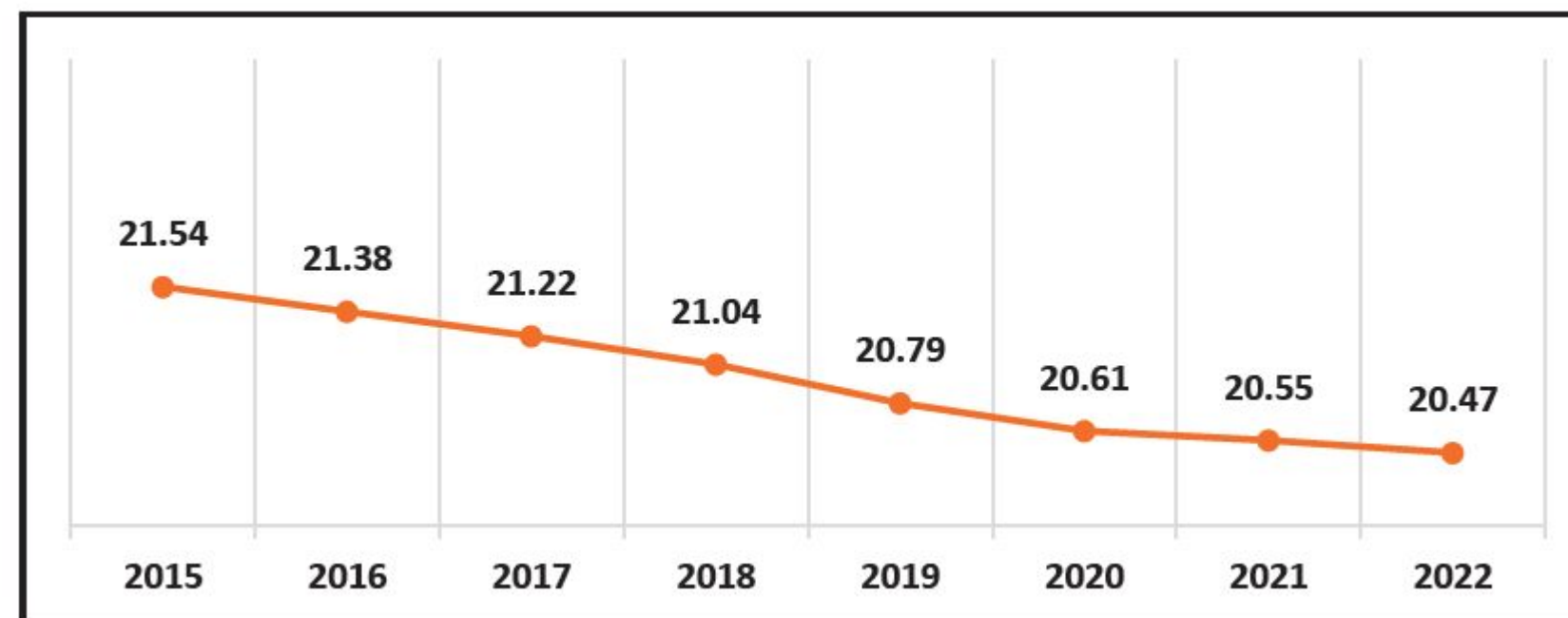
Kondisi Mantap Jalan Nasional



2. Pertumbuhan Sektor Industri Manufaktur

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB selalu menurun

Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB



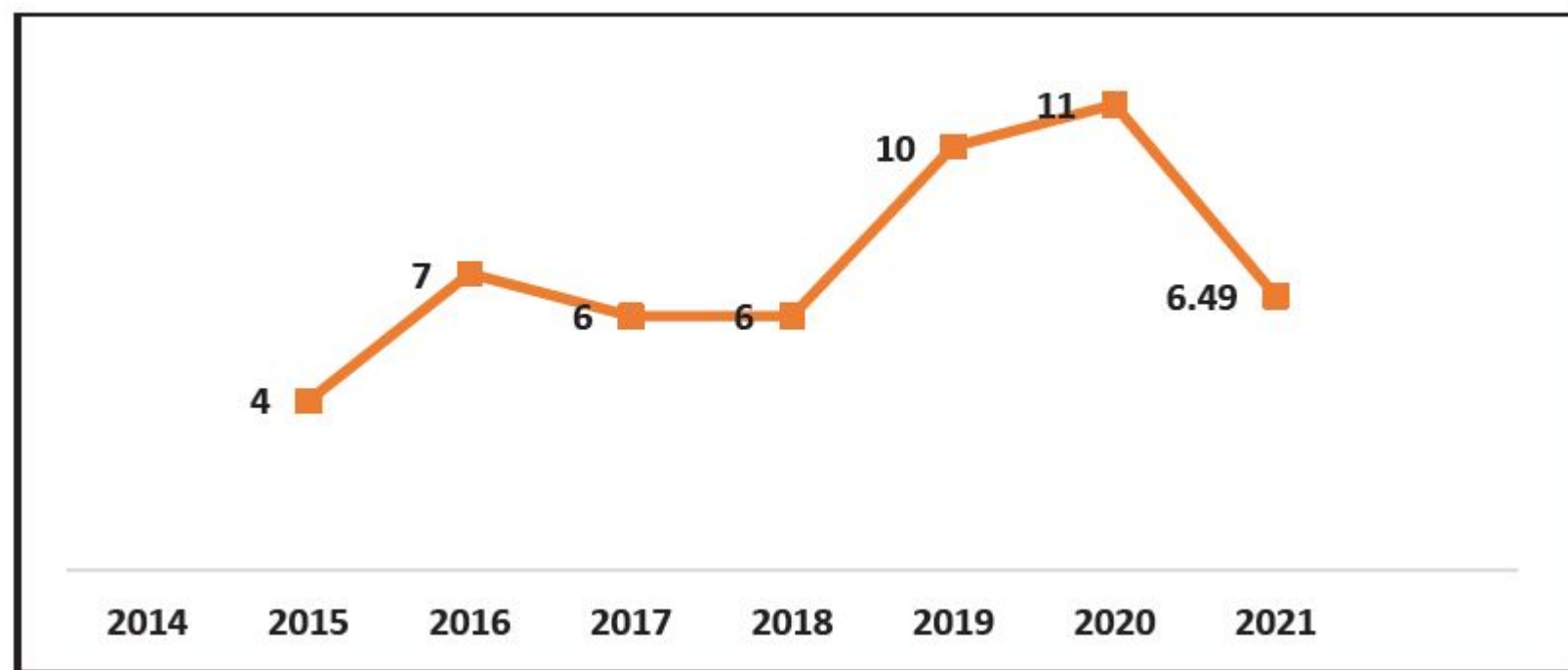
Capaian Berdasarkan Laporan Pelaksanaan SDGs Indonesia Terakhir (Tahun 2023)



Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

3. Emisi Gas Rumah Kaca

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Industri



- Emisi langsung dan tidak langsung pada sektor industri di Indonesia masing-masing menyumbang 23% dan 15,6% dari total Emisi CO₂
- Upaya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui percepatan program kendaraan listrik, modifikasi gedung hemat energi, utilisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan pengolahan sampah.

THANK YOU

✉ office@bambangbrodjonegoro.com

🔗 <https://bambangbrodjonegoro.com>

